ABSTRAK
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ELECTRONIC* KARTU TANDA PENDUDUK (*e*-KTP) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMEDANG

Electronic Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) adalah sistem yg terintegrasi untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan berupa *electronic Government* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, dalam pelaksanaanya *e*-KTP ini mempunyai kendala seperti kurangnya komunikasi yang jelas dari Disdukcapil kepada masyarakat menyebabkan masih banyaknya yang mengajukan permohonan KTP manual, sumber daya *staff* pelaksana kebijakan kurang memahami bagaimana mengoperasikan perangkat keras, hanya beberapa bagian yang hanya memahami dan mengoperasikan perangkat keras (*hardware*). *Ketiga*, sikap pelaksana dalam proses perekaman data *electronic* Kartu Tanda Penduduk (*e*-KTP) terkadang menunjukkan sikap tidak ramah kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak nyaman.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *implementing public policy* atau implementasi kebijakan publik dari *George Edwards* III yang mengemukakan bahwa yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan suatu implementasi kebijakan dipengaruhi oleh *communication, resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure*. Maksud dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic structure* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang.

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka, studi lapangan, dan observasi serta dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dan masyarakat dengan menggunakan teknik *purposive*.

Berdasarkan hasil peneltian menunjukan bahwa implementasi kebijakan *e*-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dalam proses komunikasi yang disampaikan aparatur tidak berbelit-belit walaupun disisi lain proses pencetakan *e*-KTP lama maka penilainnya cukup baik. Sumber daya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang belum baik, hal ini disebabkan kurangnya sumber daya *staff* dalam penanganan proses perekaman data serta kurangnya keahlian dalam mengoperasikan perangkat keras. *Disposition* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang cukup baik, hal ini dapat terlihat dari aparatur pelaksana kebijakan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. *Bureaucratic structure* di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang cukup baik dan berjalan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan demikian implementasi kebijakan *electronic* Kartu Tanda Penduduk cukup baik.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, *e*-KTP